

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian terkait Implementasi Peraturan Daerah Kota Bandung No 2 tahun 2009 tentang Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang dilakukan di Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan Pasar Cikutra Kota Bandung, secara umum dapat disimpulkan bahwa Implementasi terkait kebijakan diatas masih belum berjalan dengan baik dan optimal.

Dari hasil penelitian, berikut adalah penarikan kesimpulan yang didapat dari masing-masing variabel terkait Implementasi tentang Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

1. Mudah tidaknya masalah dikendalikan

Variabel karakteristik masalah digunakan untuk melihat mudah atau tidaknya suatu permasalahan dapat dikendalikan dan hal ini juga berkaitan erat dengan perilaku yang akan diatur didalam pengmpelemntasian perda. Berdasarkan hasil penelitian terkait Implementasi Peraturan Peraturan Daerah Kota Bandung No 2 tahun 2009 tentang Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern diperoleh informasi bahwa Dinas UKM, Koperasi dan Perindustrian dan Perdagangan telah menosialisasikan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 2 tahun 2009 kepada semua stakeholder dengan mengundang beberapa orang perwakilan, termasuk para pedagang di pasar tradisional. Tapi banyak para

pedagang pasar tradisional yang tidak mengetahui adanya perda nomor 2 tahun 2009. Dalam prosesnya, berbagai pihak menilai bahwa keterlibatan publik dan stakeholder yang terkait dirasa sangat kurang, walaupun keterlibatan publik tidak menjadi suatu kewajiban tetapi menjadi ironi ketika suatu aturan yang tujuan dasarnya melindungi keberadaan pasar tradisional, justru tidak melibatkan peran masyarakat dan khususnya para pedagang tradisional dikarenakan sosialisasi hanya dilakukan oleh perwakilan para pedagang saja.

Permasalahan implemmentasi Perda Kota Bandung No 2 Tahun 2009 adalah, adanya koordinasi yang kurang baik antar pemangku kepentingan. Secara teknis, sosialisasi dilakukan tidak merata, kemudian untuk pelaku usaha toko modern tidak sepenuhnya mematuhi apa yang telah diatur didalam perda. Dalam rangka membina dan melindungi pedagang pasar tradisional, tugas ini merupakan kewajiban yang harus diselesaikan secara tuntas di bidang pembinaan dan perlindungan yang merupakan proses kerja yang terpadu, maksudnya antara faktor penggerak dan sumber daya yang digunakan secara seimbang dan dinamis, sehingga usaha mewujudkan tujuan Dinas Pengelolaan Pasar dapat tercapai secara optimal, meskipun nantinya meningkatkan daya saing pasar tradisional diaturnya lewat Peraturan Daerah Kota Bandung No 2 Tahun 2009 tersebut.

2. Kemampuan kebijakan menstrukturkan proses implementasi

Pada prinsipnya setiap undang-undang, keputusan mahkamah pengadilan atau perintah eksekutif dapat menstrukturkan proses implementasi ini dengan cara menseleksi lembaga-lembaga yang tepat untuk mengimplemmentasikannya, dengan

cara memberikan kewenangan dan dukungan sumber-sumber finansial pada lembaga-lembaga tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dan dikaitkan ke dalam karakteristik kebijakan, peneliti menilai bahwa karakteristik kebijakan dari Implementasi Peraturan Daerah Kota Bandung No 2 tahun 2009 tentang Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dapat dikatakan belum mencapai tujuan seperti yang dicantumkan didalam perda,

Koordinasi antar *stakeholders* yang terjalin dapat dianalisis pengaruhnya untuk upaya penguatan keberadaan pasar. Pada dasarnya bentuk koordinasi antar *stakeholders* tersebutlah yang menjadi ciri khas dari pasar tradisional dan koordinasi antar *stakeholders* ini menjadi modal sosial yang dapat dimanfaatkan untuk menjaga keberadaan pasar, karena pada dasarnya keberadaan pasar berhubungan dengan keberadaan koordinasi antar *stakeholders* yang terlibat didalamnya.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan, diperoleh informasi bahwa *stakeholders* terkait tidak memiliki koordinasi yang baik, dikarenakan informasi terkait sosialisasi perda dirasakan tidak merata terhadap seluruh stakeholder. Kemudian disisi lain yang menjadi hal dominan yaitu masyarakat modern menyukai belanja di minimarket adalah kebersihan, kenyamanan, kelengkapan dan kepastian harga. Sebaliknya, di pedagang/warung tradisional kondisinya sangat berlawanan. Bagi sebagian orang, minimarket menawarkan kemudahan dan efisiensi dalam kegiatan jual beli, sehingga pembeli tidak perlu lagi menanyakan harga dan bisa memilih sendiri barang yang akan

dibeli. Sekalipun harga jauh lebih mahal tetapi gaya hidup masyarakat modern tidak mempertimbangkan hal tersebut. Berbeda dengan mereka yang biasa membeli di toko-toko atau pasar tradisional, selain kalkulasi harga yang lebih murah, relasi yang terbangun dari aktivitas jual beli yang dilakukan juga menjadi suatu nilai tawar tersendiri untuk terus menghidupkan toko-toko tradisional.

3. Variabel diluar lingkungan yang mempengaruhi proses implementasi

Variabel Lingkungan yaitu kombinasi antara kondisi fisik yang mencakup keadaan sumber daya. Atau dengan kata lain, kondisi yang mampu mendukung atau menghambat proses dari Implementasi Perda Nomor 2 Tahun 2009 tentang Penataan Pasar tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. Dan berdasarkan hasil penelitian diperoleh data bahwa dilihat dari pekerjaan warga di kelurahan Cikutra maka dengan adanya minimarket tidak menjadi persoalan yang kompleks bagi kebanyakan masyarakat dikarenakan pasar tradisional dan pasar modern telah memiliki pelanggan masing-masing. Pedagang yang berjualan di Pasar Cikutra tidak khawatir akan adanya pasar modern seperti Indomart, Alfamart, Yomart dan lain-lain karena yang dijual pedagang dipasar Cikutra berbeda dengan yang dijual di pasar modern. Dengan adanya pasar modern banyak warga yang terbantu dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga karena mereka tidak perlu repot-repot berdesak-desakkan dengan pembeli lain dan harga barang yang ada di pasar modern sudah pasti sehingga mereka yang belanja dipasar modern tidak perlu lagi tawar menawar.

Di pasar tradisional nilai-nilai kekeluargaan dibangun dari hasil interaksi dan komunikasi antar masyarakat. Di pasar tradisional pula interaksi antara

penjual dan pembeli menemukan eksistensinya dalam proses tawar-menawar antara penjual dan pembeli. Tawar-menawar tersebut menghilangkan monopoli harga oleh penjual yang menjadi ciri dari sistem ekonomi kapitalis. Selain itu, pola bangunan pasar tradisional sangatlah khas dimana pasar tradisional memiliki los-los yang memungkinkan interaksi antara penjual dan pembeli berlangsung dengan terbuka.

Pada saat melakukan observasi ke lapangan peneliti menemukan bahwa kelima minimarket yang berdiri di pasar cikutra dimulai pukul 07.00 sampai dengan 22.00. Sedangkan didalam Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2009, tentang Penataan Pasar Tradisional, Pusat Pembelanjaan dan Toko modern pada Bab XII waktu pelayanan dalam pasal 32 ayat A disebutkan bahwa Waktu pelayanan Pusat Perbelanjaan dan/toko Modern dimulai pukul 10.00 sampai dengan pukul 22.00 WIB.

Masyarakat berharap agar pemerintah sebagai regulator yang seharusnya mampu mewadahi semua aspirasi yang berkembang tanpa ada yang merasa dirugikan. Pemerintah diharuskan mampu melindungi dan memberdayakan serta mengatur iklim usaha perdagangan baik pedagang pasar tradisional maupun pasar modern.

Pengawasan terhadap implementasi Perda Kota Bandung No. 2 Tahun 2009 ini pun dirasa kurang meskipun pihak kelurahan cikutra sudah pernah mengadakan kepada pihak-pihak yang berwenang dalam hal pelanggaran perda ini. Ditambah lagi dengan preferensi masyarakat yang memang berpihak kepada minimarket dan juga supermarket. Sebaiknya pemerintah bukan hanya sekedar

mengesahkan saja keberadaan Perda Kota Bandung No. 2 Tahun 2009 ini melainkan perlu untuk terus dilakukan pengawasan terhadap implementasinya di lapangan agar seluruh pihak diuntungkan, tidak hanya pihak bermodal besar saja.

6.2 Saran

Dari hasil penelitian yang peneliti lakukan, maka peneliti memberikan saran kepada Pemda Kota Bandung sebagai berikut :

1. Mudah tidaknya masalah dikendalikan

Pemerintah Daerah seharusnya lebih mengutamakan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap implementasi Perda Kota Bandung no 2 tahun 2009 tentang pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern. Setiap stakeholder terkait seharusnya diberikan sosialisasi yang merata agar setiap stakeholder memahami perannya masing-masing sehingga para Implementator melaksanakan tugasnya tidak hanya berdasarkan SOP saja tetapi juga memahami tujuan dan maksud dari Perda Kota Bandung No 2 Tahun 2009.

2. Kemampuan kebijakan menstruktur proses implementasi

Sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas UKM, Koperasi dan Perindustrian dan perdagangan harus lebih rutin dan dilakukan secara berkelanjutan. Agar informasi terkait perda dapat diterima secara utuh dan merata oleh pedagang pasar tradisional dan pelaku usaha pasar modern. Masing-masing lembaga terkait harus

memahami peranannya masing-masing dan berkomitmen agar tujuan perda dapat tercapai.

3. Variabel diluar lingkungan yang mempengaruhi proses implementasi

Sebaiknya suatu undang-undang yang dirancang atau dirumuskan dengan baik dapat membekali para pejabat dengan arah kebijakan dan sumber-sumber hukum yang memadai guna menanggulangi timbulnya perubahan-perubahan dari masyarakat. Dan sebaiknya perda juga dapat menghasilkan perubahan-perubahan perilaku masyarakat yang berbeda-beda kondisinya atau bersifat dinamis.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Anderson, James E. 1978. *Public Policy Making*. Chicago : Holt, inehart and Winston.
- D. Mazmanian, dan P.A Sabatier . 1983. *Implementing and Public Policy* (United States of America : Scott Foresman and Company). Southern California: University Press of America.
- Edwards III, G.C. 1984. *Implementing Public Policy*. Washington: Congressional Quarterly Press.
- Grindle, M.S. 1980. *Politics and Policy Implementation in The Third World*. New Jersey: Princeton University Press.
- Setiawan, Guntur. 2004. *Implementasi Dalam Birokrasi Pembangunan*, Bandung: Remaja Rosdakarya Offset.
- Cresswell, T. 2007. *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Tradition*. California: Sage.
- Merriam, S. 2009. *Qualitative Research: A Guide to Design and Implementation*. USA: Jossey-Bass.
- Moleong, L.2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- James Lester P, dan Joseph Stewart Jr. 2004. *Public Policy: An Evolutionary Approach*, wadsworth/Thomson Learning.
- McCawley, Peter. 2015. Infrastructure Policy In Indonesia, 1965–2015: A Survey. Bulletin of Indonesian Economic Studies. Vol. 51.
- Thohah, Miftah. 1984. *Dimensi-Dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

- Usman, Nurdin.2002. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Jakarta: PT Raja Garfindo Persada.
- Pawito, 2005. *Penelitian Komunikasi Kualitatif*. (Yogyakarta: PT. Lkis Pelangi Aksara)
- R. Kriyantono, 2006 *Teknik Praktis Riset Komunikasi* (Jakarta: Kencana Prenada Group).
- Rivai, Veithzal. 2005. *Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo
- Tachjan ,*Implementasi kebijakan publik*. 2006. (Penerbit AIPI Bandung)
- Silalahi, U. 2010. *Metode Penelitian Sosial*, Bandung: PT Refika Aditama.
- Wahab, Abdul. 2012. *Analisis Kebijaksanaan: Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara (Ed 2)*, Bumi Aksara
- Wahab, Abdul. 1997. “*Analisis Kebijaksanaan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*”, Jakarta:Bumi Aksara.

Jurnal

- Matland, R. „Synthesizing the Implementation Literature: The Ambiguity-Conflict Model of Policy Implementation“, *Journal of Public Administration Research and Theory*, 5 (1995): 2,4,8.
- Lukman Muslimin, Fibria Indiati, dan Tjahya Widayanti. 2012. *Kajian Model Pengembangan Pasar Tradisional*.Buletin Ilmiah.

Dokumen

Data Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kota Bandung 2013

Dokumen Tipologi dan Profil dari Kelurahan Cikutra Kec. Cibeunying Kidul Kota Bandung tahun 2017

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 2 tahun 2009 tentang Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

Internet

Mengenal pengertian Pasar Tradisional,
<http://www.definisimenurutparaahli.com/pengertian-pasar-tradisional-dan-pasar-modern/> (4.1.2018), Pukul 13.00.

Mengenal Pengertian Pusat Perbelanjaan,
<https://www.scribd.com/document/341252211/Pengertian-Dan-Sistem-Pusat-Perbelanjaan> (4.1.2018), Pukul 13.17.

Pengertian dan Definisi Publik“
https://carapedia.com/pengertian_definisi_publik_info2104.html (28.12.2017), Pukul 17:15.

Pengertian dan Definisi Publik“
https://carapedia.com/pengertian_definisi_publik_info2104.html (28.12.2017), Pukul 17:15, dikutip dari I. Kant (1784).

Peraturan Daerah Kota Bandung No 2 Tahun 2009,
<http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/files/ld/2009/KotaBandung-2009-2.pdf> (9 November 2016), Pukul 14.34

Perkembangan Jumlah Minimarket di Kota Bandung, <http://www.pikiran-rakyat.com/foto/2014/09/23/298078/mini-market-di-kota-bandung-overload> (9 November 2016). Pukul 15.20

Persyaratan Pendirian Minimarket, <http://memulaibisnisproperty.com/pengertian-dan-ruang-lingkup-toko-modern> (4.1.2018), Pukul 13.29.

www.ekonomi.kompasiana.com tentang keberadaan minimarket berdasarkan data yang diperoleh dari Asosiasi Pedagang Pasar Tradisional (APPTI)